BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Memuat konsep-konsep teoritis yang digunakan sebagai kerangka atau landasan untuk menjawab masalah penelitian, yang difokuskan kepada literatur-literatur yang membahas konsep penelitian.

2.1.1 Pengertian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Abdul Halim (2012:24) dalam buku Akuntansi Keuangan Daerah mengungkapkan :

> "Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah".

Sedangkan, menurut Rosmery Elsye (2016:2) definisi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

> "Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaran pemerintah daerah yang dapat dinilai dari seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah".

Menurut Ahmad Yani (2009:428) Definisi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

> "Suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah".

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat dikatakan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah adalah serangkaian proses dan prosedur yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah. Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah ini juga merupakan salah satu fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan.

2.1.1.1 Indikator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Ahmad Yani (2009:429) yang terkait pada sistem informasi pengelolaan keuangan daerah meliputi:

1) Keamanan Data;
2) Ketepatan Waktu;
3) Ketelitian;
4) Variasi Laporan atau *Output*;
5) Relevan.

Adapun penjelasan indikator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Keamanan data

   Keamanan data adalah perlindungan data di dalam suatu sistem terhadap otorisasi tidak sah, modifikasi, atau perusakan dan perlindungan sistem komputer terhadap penggunaan tidak sah atau modifikasi.

2. Ketepatan waktu

   Ketepatan waktu adalah suatu pemanfaatan informasi oleh pengambil keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitas atas kemampuannya untuk mengambil keputusan. Ketepatan waktu bagi pemakai informasi sangat penting, informasi yang tepat waktu berarti jangan sampai informasi yang disampaikan sudah basi atau sudah menjadi rahasia umum.

3. Ketelitian

   Ketelitian adalah kesesuaian diantara beberapa data pengukuran yang sama yang dilakukan secara berulang. Tinggi rendahnya tingkat ketelitian hasil suatu pengukuran dapat dilihat dari harga deviasi hasil pengukuran.

4. Variasi Laporan atau *Output*

   Laporan atau *Output* adalah suatu cara komunikasi yang dalam hal ini penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau badan karena tanggungjawab yang dibebankan kepadanya. Karena laporan yang dimaksud sering berbentuk tertulis maka dapat dikatakan juga bahwa laporan adalah semacam dokumen yang menyampaikan informasi mengenai suatu fakta yang telah dialami atau diselidiki.

5. Relevan

   Relevan adalah hal-hal yang sejenis yang saling berkaitan dengan subjek dalam konteks yang tepat atau terhubung dan terkait dengan situasi saat ini.

2.1.2 Pengertian Alokasi Dana Desa

Menurut Soemantri (2011:155) mendefinisikan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

> "Dana yang bersumber dari Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat".

Sedangkan, menurut Ahmad Yani (2009:348) Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

> "Dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat, yang disalurkan dari Kabupaten melalui Kas Desa".

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat dikatakan bahwa alokasi dana desa merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

2.1.2.1 Indikator Alokasi Dana Desa

Menurut Chabib, Soleh dan Heru Rochmansjah (2015:3) yang terkait pada alokasi dana desa meliputi:

1) Perencanaan;
2) Pelaksanaan;
3) Penatausahaan;

4) Pelaporan;

5) Pertanggungjawaban.

Adapun penjelasan indikator Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan

   Perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunnya RPJMDes dan RKPDes yang menjadi dasar untuk menyusun APBDes yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa.

2. Pelaksanaan

   Pelaksanaan keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran uang dan kegiatan di lapangan. Kegiatan yang dilakukan sesuai kewenangan desa yang diolah melalui rekening desa. Artinya, semua penerimaan dan pengeluaran desa harus dikelola melalui rekening desa yang didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

3. Penatausahaan

   Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi.

4. Pelaporan

   Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan.

5. Pertanggungjawaban

   Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

2.1.3 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2016:143) dalam buku Akuntansi Sektor Publik mengemukakan bahwa :

> "Kualitas laporan keuangan daerah merupakan *output* dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk pemberian informasi bagi pihak-pihak yang akan menjadikan informasi keuangan tersebut sebagai dasar pembuatan keputusan".

Menurut Erlina dan Rasdianto (2013:8) dalam buku Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual mengemukakan bahwa :

> "Kualitas laporan keuangan daerah adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya merupakan keempat karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami agar laporan keuangan dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki".

Sedangkan, menurut Baldric (2015:12) dalam buku Akuntansi Sektor Publik menjelaskan bahwa :

> "Kualitas laporan keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut".

2.1.3.1 Indikator Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Menurut Erlina dan Rasdianto (2013:8) yang terkait dengan kualitas laporan keuangan meliputi :

1) Relevan;
2) Andal;
3) Dapat dibandingkan;
4) Dapat dipahami.

Adapun penjelasan indikator Kualitas Laporan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Relevan

   Laporan keuangan yang relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dalam mengevaluasi masa lalu dan memprediksi masa depan, seperti :

   a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value)*
   b) Memiliki manfaat prediktif *(predictive value)*
   c) Tepat waktu
   d) Lengkap, disajikan mencakup semua informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

2. Andal

   Informasi yang disajikan bebas dari pengertian yang menyesatkan dari kesalahan material, menyajikan setiap fakta dengan jujur, sarta dapat diverifikasi.

3. Dapat dibandingkan

   Informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya, atau dengan laporan keuangan entitas lain.

4. Dapat dipahami

   Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Menurut, Mardiasmo (2009:32) mengungkapkan :

> "Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang andal, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang andal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan sehingga penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang tidak baik akan menyebabkan kualitas laporan keuangan daerah juga tidak baik".

Sedangkan, menurut Chabib, Soleh dan Heru Rohcmansjah, (2010:67) mengungkapkan:

> "Laporan keungan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Maka untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah daerah harus berupaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah dengan menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Keungan Daerah".

Menurut hasil penelitian Maulana Yusup (2016) tentang Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Hasil penelitiannya mengemukan bahwa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah sebesar 72,1%, sementara itu sisanya sebesar 27,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang kemungkinan mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Pernyataan di atas didukung oleh hasil penelitian Siska, M.Suyanto & Armadyah (2014) tentang Pengujian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Web Kabupaten Pacitan Dengan Menggunakan *Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology* (UTAUT), hasil penelitiannya mengemukakan bahwa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis web di kabupaten Pacitan dinyatakan diterima. Hal ini dapat diperoleh dari hasil angket dari 40 responden berdasarkan variabel-variabel UTAUT menyimpulkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dapat meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

2.2.2 Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Menurut Mardiasmo, (2009:67):

> "Bahwa sistem pertanggungjawaban keuangan suatu instuti dapat berjalan dengan baik bila terdapat mekanisme pengelolaan keuangan yang baik pula, ini berarti pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam anggaran pendapatan belanja daerah memiliki posisi strategis dalam mewujudkan manajemen pemerintah yang akuntabel sehingga untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas harus disusun oleh personel yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan keuangan daerah dan alokasi dana desa".

Sedangkan menurut Abdul Halim, (2012:28) mengungkapkan:

> "Pengelolaan keuangan daerah termasuk alokasi dana desa harus dipahami secara memadai oleh pengelola dan penyaji informasi keuangan agar dapat dijadikan salah satu alat dalam mengendalikan roda pemerintahan melalui kualitas laporan keuangan daerah".

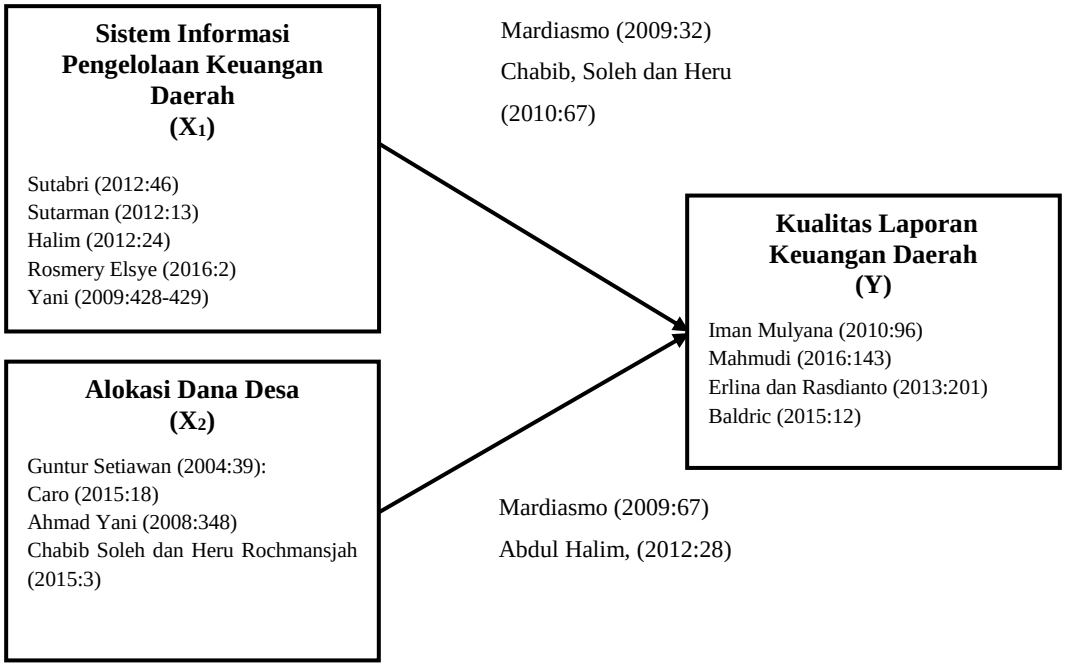
Menurut Penelitian yang telah dilakukan oleh Febriyani, Lintje & Jessy (2017) tentang Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa variabel pinsip pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dengan di terapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan di setiap masing-masing instansi pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Pernyataan di atas didukung oleh hasil penelitian Lia, Andi & Husin (2016) tentang Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan dan Sistem Akuntansi

Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil kajiannya menunjukkan kompetensi pengelola keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara baik secara parsial maupun simultan. Artinya semakin baik kompetensi pengelola keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

2.2.3 Bagan Paradigma Penelitian



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut, Sugiyono (2014:99):

> "Menjelaskan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik".

Sedangkan, menurut Nanang Martono (2014:67):

> "Hipotesis adalah jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji atau rangkuman simpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka".

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka peneliti berasumsi mengambil keputusan sementara (hipotesis) sebagai berikut:

H_1 : Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

H_2 : Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.